

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI TIDAK MENJALANKAN KONSEP *SELF ASSESSMENT* PADA
KPP-SENAPELAN KOTA PEKANBARU
OLEH**

MAYAHARJASARI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Oral Comprehensif Sarjana Lengkap Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru



NIM. 10573002084

JURUSAN AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2012**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Menjalankan Konsep Self Assessment Pada KPP-Senapelan Kota Pekanbaru”***. Yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti Ujian Oral Comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Susqa Syarif Kasim.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, seperti pada pepatah : “ *Tak ada gading yang tak retak*”. Hal ini tidak lain dikarenakan oleh keterbatasan, kemampuan dan cara berfikir penulis serta terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mahmuzar M.Hum, selaku pembimbing I yang telah memberikan motivasi, pengarahan, saran dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Khairil Hendry, SE,MSi,Ak, selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam perbaikan-perbaikan skripsi, arahan dan sumbangan pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.sekali lagi terima kasih pak.....
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi UIN yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

4. Orang tua saya yang tersayang, ayahanda terimakasih atas semua doa, pengorbanan, dukungan dan ibunda yang saya sayangi yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta do'a yang tidak bertepi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Sahabat terbaik ku,,,,, terima kasih tuk dukungan, perhatian and semangat yang kalian berikan ,,,,,

Akhirnya kepada semua pihak yang namaya tidak dapat disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih. Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi amal disisi Allah SWT, amin.

Pekanbaru, Maret 2011

Penulis

Maya Harja Sari

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB. I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB. II TELAAH PUSTAKA | 9 |
| A. Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 9 |
| 1. Pengertian SPT | 9 |
| 2. Fungsi SPT | 12 |
| 3. Jenis SPT | 13 |
| 4. Tata cara Penyelesaian SPT..... | 15 |
| B. Pengertian Self Assesment..... | 17 |
| C. Pengaruh faktor kesadaran terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya | 18 |
| D. Pengaruh faktor pengetahuan WP terhadap wajib pajak tidak Mengisi sendiri SPT Tahunannya | 19 |
| E. Pengaruh factor sosialisasi SPT terhadap wajib pajak tidak mengisi Sendiri SPT Tahunannya..... | 24 |
| F. Pengaruh faktor kualitas Layanan (Service Quality) terhadap Wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya | 26 |
| 1. Pengertian Kualitas Layanan (service quality) | 28 |
| 2. Faktor-faktor kualitas layanan Menurut Zeithaml Valeria Dalam Philip Kotler dan Kevin Lane Keller | 28 |
| G. Model Penelitian | 30 |
| BAB. III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Populasi | 31 |
| B. Metode Pengambilan Sampel | 3 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 33 |
| D. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data | 35 |
| E. Rancangan Kuesioner | 37 |
| F. Identifikasi Variabel | 38 |
| G. Analisis Data | 39 |
| H. Teknik Pengujian Data Statistik Deskriptif..... | 40 |

| | |
|--|-----------|
| I. Metode Pengujian Kualitas Data | 41 |
| 1. Uji Validitas Data | 49 |
| 2. Uji Realibilitas Data | 53 |
| J. Pengujian Normalitas Data | 44 |
| K. Pengujian Asumsi Klasik | 56 |
| 1. Uji Multikolinearitas | 55 |
| 2. Uji autokorelasi | 56 |
| 3. Uji Heteroskedastisitas | 45 |
| L. Pengujian Hipotesis | |
| M. Koefisien Determinasi | 45 |
| BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| A. Kuesioner dan Demografi | 47 |
| B. Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel | 48 |
| C. Analisis Uji Kualitas Data | 49 |
| 1. Uji Validitas Data | 49 |
| 2. Uji Realibilitas Data | 53 |
| D. Analisis Uji Normalitas Data | 54 |
| E. Analisis Uji Asumsi Klasik | 55 |
| 1. Uji Multikolinearitas | 55 |
| 2. Uji autokoerlasi | 56 |
| 3. Uji heterokedastisitas | 57 |
| F. Analisis Regresi | 58 |
| G. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan | 59 |
| H. Koefisien Determinasi | 62 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 64 |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Keterbatasan | |
| C. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel IV. 1 : Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner | 64 |
| Tabel IV. 2 : Demografi Responden | 64 |
| Tabel IV. 3 : Statistik Deskriptif | 64 |
| Tabel IV. 4 : Rangkuman Validitas Instrumen Kesadaran WP..... | 64 |
| Tabel IV. 5 : Rangkuman Validitas Instrumen Sosialisasi SPT..... | 64 |
| Tabel IV. 6 : Rangkuman Validitas Instrumen Pengetahuan WP | 64 |
| Tabel IV. 7 : Rangkuman Validitas Instrumen Kualitas Layanan | 64 |
| Tabel IV. 8 : Rangkuman Validitas Instrumen SPT Tahunan | 64 |
| Tabel IV. 9 : Hasil Uji Reliabilitas..... | 64 |
| Tabel IV.10 : Nilai Tolerance dan VIF | 64 |
| Tabel IV.11 : Statistik Durbin - Watson | 64 |
| Tabel IV.12 : Hasil Analisis Regresi..... | 64 |
| Tabel IV.13 : Koefisien Determinasi | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan ekonomi nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. Dimana anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (*self assesmenf*).

Dalam sejarah perkembangan sistem *self assesment* di Indonesia proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar (Tjahjono dan Husein, 2000:27) Namun pada kenyataannya dalam pengisian SPT Tahunan tidak semua wajib pajak mengisi sendiri melainkan ada yang menggunakan jasa konsultan. Konsultan sendiri ada 2 macam yaitu konsultan yang benar-benar seorang konsultan dan konsultan plat merah yaitu orang-orang pajak yang berperan ganda

menjadi seorang konsultan pajak. Menurut Surat Edaran 52/PJ/UP90/2001 butir ke 6, seorang petugas pajak tidak diperbolehkan menjadi konsultan pajak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pengawai kantor pajak yang berperan ganda menjadi konsultan (Hamdan, 2002).

Dari sisi wajib pajak terdapat 2 faktor utama yang mendukung keberhasilan tingkat kepatuhan wajib pajak melaksanakan sistem *self assesment* yaitu faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan/pemahaman (Pamungkas, 2003). Sedangkan dari sisi Direktorat Jenderal Pajak terdapat tiga faktor yang mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan sistem *self assesment* yaitu penyuluhan (sosialisasi) perpajakan, pelayanan perpajakan, dan pengawasan perpajakan (Hutagaol, 2005). Adapun yang

menyebabkan tidak patuhnya wajib pajak melaksanakan sistem *self assesment* disebabkan karena tidak relevannya buku petunjuk pengisian SPT dan sering berubahnya format SPT yang memusingkan wajib pajak (Hamdan, 2002).

Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan (235/KMK.03/2003) pasal 1 yaitu Wajib Pajak dikatakan patuh apabila: (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih rendah, salah satunya ditunjukkan dengan paling rendahnya *tax ratio* Indonesia dikawasan ASEAN) yaitu rata-rata sebesar

12,2 - 13,5% untuk tahun 2001-2006, dibandingkan dengan tax ratio Malaysia (20,17%), Singapura (21,4%), Brunei (18,8%) dan Thailand (17,27%), (Gunadi, 2006).

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan, maka penerimaan pajak akan tinggi. Di berbagai Negara demokratis, aspek kesadaran dan kepatuhan menjadi ideologi perpajakan. Kenapa disebut ideologi, karena menempatkan faktor kesadaran dan faktor kepatuhan sebagai jantung atau jiwa dari sistem perpajakan itu sama dan sebangun dengan ideologi demokrasi yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai jiwanya. Menyadari hal ini Indonesia sejak awal berupaya

membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Upaya itu semakin digiatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang perpajakan baru yang menganut sistem *self assesment*.

Walaupun sudah tersedia hukuman administratif maupun ancaman hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mau atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi salah satu agenda penting baik dinegara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Menurut Rochmat Soemitro (2000:15) bahwa keberhasilan sistem *self assesment* akan ditentukan

oleh (1) kesadaran pajak dari wajib pajak, (2) kejujuran wajib pajak, (3) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (4) *tax discipline*. Menurut pendapat ini bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Marpaung 2009, menguji tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas

layanan berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru sedangkan kesadaran, sosialisasi SPT dan pengetahuan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap

Wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dari penelitian yang diatas, peneliti mencoba untuk menguji tentang **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Menjalankan Konsep *Self Assessment* Pada KPP-Senapelan Kota Pekanbaru.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*?
2. Apakah sosialisasi SPT mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*?
3. Apakah pengetahuan wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*?

4. Apakah kualitas layanan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*?
5. Apakah pengawasan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
2. Untuk membuktikan apakah sosialisasi SPT mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
3. Untuk membuktikan apakah pengetahuan wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
4. Untuk membuktikan apakah kualitas layanan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
5. Untuk membuktikan apakah pengawasan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkuat manfaat teoritis yang digunakan peneliti dengan kondisi nyata di lapangan, dan juga diharapkan dapat membawa perubahan dan menambah pengetahuan tentang sistem perpajakan dan perilaku wajib pajak yang saat ini terjadi.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu perpajakan khususnya terhadap wajib pajak yang tidak menjalankan konsep *self assessment*, pengetahuan/pemahaman Wajib Pajak tidak menjalankan konsep *self assessment*, sejauhmana sosialisasi pajak yang dilakukan Dirjen Pajak serta kualitas layanan pemungutan pajak oleh Dirjen Pajak.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 5 bab yang merangkum latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan disajikan pada tiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang di mulai dari populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data. Variabel dan pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini di uraikan mengenai gambaran secara umum tentang objek, deskripsi hasil penelitian, melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian agar dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Anastasia Diana, 2003:9). Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

1) SPT Masa

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

2) SPT Tahunan

Merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak penghasilan, SPT PPh berfungsi sebagai sarana untuk:

- a) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak

- c) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.
- d) Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan Pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

3. Jenis Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26).
- b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26).
- c. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
- d. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 (SPT Masa PPh Pasal 15)
- e. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
- f. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pemungut,
- g. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 (SPT Masa PPh Pasal 22)
- h. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

- i. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penjualan atas barang mewah (SPT Masa PPn BM).
- j. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan).
- k. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan) yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
- l. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi).
- m. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Tahunan PPh Pasal 21).

4. Tata Cara Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT)

- a) Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak).
- b) Wajib Pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c) Wajib pajak harus menandatangani serta menyampaikan kembali ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Apabila

SPT disampaikan melalui Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, maka tanda bukti dan tanggal pengisian SPT yang telah lengkap dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

d) Bukti-bukti wajib dilampirkan dalam SPT:

1) Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada SPT

Tahunan Wajib Pajak Badan:

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari wajib pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b. Daftar perhitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
- c. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat Setoran pajak Pasal 29 yang seharusnya, dalam hal terdapat kekurangan pajak terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal SPT ditandatangani bukan oleh wajib pajak.
- f. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak atau besarnya PPh Pasal 25.

2) Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada SPT

Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan:

- a) Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun pajak yang bersangkutan dari wajib pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.
- b) Daftar perhitungan penyusutan dan atau amortisasi fiskal.
- c) Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d) Surat Setoran Pajak Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29.
- e) Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang dalam hal ditandatangani oleh Ahli Waris.
- f) Fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2, dalam hal Wajib Pajak menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja.
- g) Perhitungan PPh yang terutang oleh masing-masing pihak bagi Wajib Pajak yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- h) Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.
- i) Bukti setoran Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama islam kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah.
- j) Lampiran-lampiran lain yang dianggap perlu untuk menjelaskan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh Pasal 25.

- 3) Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pencatatan:
- a) Jumlah peredaran atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun
 - b) Keterangan dan atau dokumen seperti yang disertakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan seperti nomor 2) dokumen keempat sampai kesepuluh.
 - c). Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia.

5. Batas Terakhir Pelaporan SPT

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan oleh wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 UU KUP adalah : SPT tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, kecuali wajib pajak mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu. Tabel batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Tabel 2.1 : Batas waktu penyampaian SPT Tahunan

| Jenis Pajak | Yang menyampaikan SPT | Batas waktu penyampaian SPT |
|------------------------|-----------------------|---|
| SPT PPh Tahunan | WP yang punya NPWP | Tgl 31 bulan ketiga setelah tahun pajak |
| SPT PPh ps1 21 Tahunan | Pemotong PPh ps1 21 | Tgl 31 bulan ketiga setelah tahun pajak |

Sumber: Kep Dirjen Pajak 220/PJ.2003

Pada batas terakhir pelaporan SPT ternyata masih banyak wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunannya. Masih banyak ditemukan wajib

pajak yang tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya bisa kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 : Persentase Wajib Pajak Yang Mengisi Dan Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya

| Karakteristik | Yang Mengisi Sendiri SPT Tahunannya | Yang Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya | Persentase |
|---------------|-------------------------------------|---|------------|
| Wajib Pajak | 50% | 50% | 100% |

Sumber : KPP Senapelan Pekanbaru

B. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (UU No 9 Tahun 1994). Untuk lebih lengkapnya yang tennasuk dalam pengertian wajib pajak adalah :

- a. Setiap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta (penjelasan pasal 1 ayat KUP)
- c. Badan termasuk BUT
- d. Wajib pajak termasuk pemotong
- e. Pengusaha kena pajak

Wajib Pajak dilihat dari subjek pajaknya dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Subjek Pajak Dalam Negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila mereka telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia tidaklah harus berturut-turut, tetapi mereka melakukan kegiatan atau usaha atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari penghasilan di Indonesia atau diperoleh mereka melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi disimpulkan wajib pajak adalah Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif (Rochman Soemitro).

3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi sering juga disingkat dengan WPOP. Wajib pajak orang pribadi dapat dikelompokkan menjadi:

- a) WP orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- b) WP orang pribadi yang diberi kekuasaan warisan yang belum dibagi.
- c) Karyawan atau karyawan yang memperoleh penghasilan di atas PTKP.
- d) WNI yang bekerja pada bukan subjek pajak penghasilan.
- e) WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

a. Kewajiban wajib pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

b. Pendaftaran

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi.

Self assesment /self taxing system adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis boleh menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya utang pajaknya, menyetorkannya ke kas Negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, penetapan dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus (Supramono.2005, hal 10). Sistem perpajakan sendiri ditetapkan pada pemajakan PPh Tahunan Wajib Pajak Badan/BUT/Orang Pribadi/Warisan yang belum dibagi, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh final

tertentu, PPN/PPn BM atas penyerahan barang /jasa kena pajak tertentu, Bea Materai, BPHTP, PBB (tetapi hanya jiwanya saja, karena dalam prakteknya kebanyakan dilakukan oleh Fiskus).

Secara konsepsional sistem *self assesment* itu juga tidak berjalan sendirian, karena harus didukung perangkat administrasi perpajakan yang telah mengikuti prinsip-prinsip administrasi modern. Dengan sistem baru ini pihak administrator pajak idealnya hanya bertindak sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan, pengendalian dan penelitian apabila ada kecurigaan bahwa wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lagi-lagi konsep yang ideal dan berorientasi ke masa depan (*visioner*) itu terbentur berbagai kendala faktual, seperti masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta sistem politik yang sentralistik dan otoriter. Padahal kunci utama pengumpulan pajak dengan sistem *self assesment* adalah pada kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Melalui kepatuhan ini administrasi pajak dapat mengkonsentrasikan sumber dayanya secara efisien dan efektif, misalnya dalam mengidentifikasi informasi yang berhubungan dengan wajib pajak gagal mematuhi kewajiban pajaknya. Persoalannya kepatuhan sukarela ini adalah produk dari sikap mental yang didalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif.

C. *Self Assessment*

Prinsip self assessment ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak. Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.” Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan. *Sistem self assessment* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

D. *Official Assessment*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam system ini, para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh para fiskus untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Terutama dalam proses negosiasi penetapan atau perhitungan besarnya pajak, sering kali terjadi tawar-menawar antara fiskus dan WP. Kesempatan diatas memang terbuka lebar, karena dalam sistem ini petugas pajaklah yang mendatangi masyarakat untuk mendaftar mereka sebagai WP. Maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem *Official Assessment* adalah :

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat WP kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan.
2. Kelemahan sistem diatas didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundang-undangan pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan perpajakan dengan penetapan bennacam-macam tarif yang cenderung tinggi, hal ini semakin membingungkan system pemungutan pajak, bahkan ada kecenderungan untuk melawan pajak dengan cara menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Ragam dan jenis pajak dalam system perpajakan yang lama terlalu banyak.
4. Sistem pemungutan pajak sangat berbelit-belit.

E. *Withholding Sistem*

Di Indonesia sistem *Self assessment* diterapkan pula bersama-sama dengan sistem Withholding, yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO.

Withholding adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh WP itu sendiri.

Besarnya angsuran pajak ditentukan oleh WP yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu tanggapan, sedangkan besarnya pajak yang terutang sesungguhnya akan diterapkan kemudian oleh fiskus. Penerapan system ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik daripada system pemungutan sebelumnya, namun disana-sini masih ditemukan penyelewengan oleh oknum pajak, seperti misalnya pembayaran pajak atas dasar kompromi dengan pengertian tahu sama tahu, dimana fiskus sering menawarkan jasa perhitungan dengan pembayaran pajak asal pihak yang dibantu dapat tahu sama tahu.

Yang dimaksud dengan tata cara MPS dan MPO adalah menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. Seperti dijelaskan diatas, perhitungan pajak dapat dilakukan oleh WP itu sendiri dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu tanggapan atau perkiraan mengenai besarnya utang pajak yang terutang. Dalam tata cara MPS, masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan, dan labanya, berikut pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas

negara tanpa campur tangan aparat pajak. Sementara kegiatan aparat pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian, dan pemeriksaan perhitungan dan penyetoran pajak kepada WP pada akhir tahun takwim.

Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MPS di atas dan demi terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan bagi WP untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlunya sistem MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MPS. Tata cara MPO adalah suatu tata cara untuk menghitung pajak orang lain berikut pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara dengan menunjuk perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang berwenang.

F. Pandangan Islam Tentang Pajak

Islam adalah agama yang anti kezaliman. Zakat dan pajak diwajibkan bagi umat Islam, tetapi kewajiban pajak harus diberikan keringanan bagi umat Islam. Pengutipan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawiy. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar-benar kosong. Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak

dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

- b. Pemungutan pajak yang adil. Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib dengan syara. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan dari masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. (Qardhawih. 1081 -1082).
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk pemuas nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya. Karena itu, Al-Qur'an memperhatikan sasaran zakat secara rinci, jangan sampai menjadi permainan hawa nafsu, keserakahan atau untuk kepentingan money politik.
- d. Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan

Namun bagaimana Islam memandang pajak. Di dalam Islam segala sesuatu pasti ada solusinya, karena yang membuat undang-undang bukan anggota dewan di parlemen atau manusia manapun yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan yang hanya mengikuti hawa nafsunya melainkan yang membuat

undang-undang hanyalah Allah Sang Khaliq yang telah sempurna dan menyeluruh menurunkan pedoman hidup yaitu Al Qur'an. Pajak memang salah satu sumber pemasukan bagi Negara dalam Islam namun bukan yang utama, tidak seperti kapitalis maupun lainnya yang menempatkan pajak dalam pos penerimaan utama negara. Dalam Islam ada berbagai sumber pemasukan bagi kas negara, diantaranya Ghanimah/ harta hasil rampasan perang, Jizyah/ jaminan bagi kafir Dzimmi, maksudnya yaitu kewajiban sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintahan Islam oleh kafir Dzimmi sebagai jaminan bahwa pemerintahan Islam akan menjaga hak-haknya sebagaimana warga negara muslim yang lain. Sumber pemasukan lain adalah Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Dan posisi pajak adalah bilamana negara mengalami paceklik dan kondisi Baitul Maal dalam keadaan kosong, di situasi ini negara memungut pajak kepada rakyatnya untuk kemudian diganti bilamana kondisi Baitul Maal telah kembali stabil. Begitu indahny Allah mengatur urusan hambanya tanpa membebani suatu apapun, namun sistem pendapatan negara dan kepemilikan tersebut hanya dapat dilaksanakan bila Syari'at Islam diterapkan secara kaffah/menyeluruh tidak secara parsial/setengah-setengah yang seperti sekarang ini terjadi. Surat Al-Mai'dah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَمَنْ أَنِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا فِي
الْإِثْمِ صَدُّوكم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi' ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya amat berat siksa-Nya*

Surat Al-Hasyr ayat 7

ن وَابْنِ يَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 أَنْتَهُوَ السَّبِيلُ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr; 7)*

Al-hijr: 56

لُون لَضَاءً إِلَّا رَّبِّي قَالِ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةٍ

Artinya : *“Dia (Ibrahim) berkata “Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya ,kecuali orang yang sesat”*

G. Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan dari penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya dilakukan oleh Adi dalam Rika (2005), dimana hasil penelitian tersebut kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan *self assesment*, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelanggaran sistem *self assesment* sedangkan sosialisasi gagal dalam uji validatis.

Rika (2006) melakukan penelitian yang sama yakni faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi di kawasan Sidoarjo barat tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya. Hasilnya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya. Variabel pengetahuan wajib pajak dan kualitas layanan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak tidak mengisi sendiri SPT tahunannya sedangkan variabel sosialisasi SPT mengalami kegagalan dalam uji validatis.

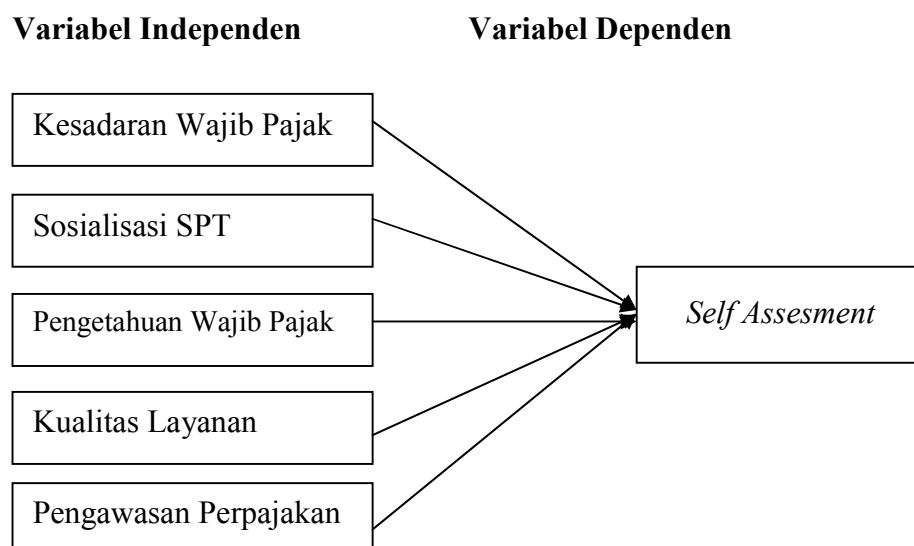
Hamzah Marpaung 2009, menguji tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh signifikan

terhadap wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru sedangkan kesadaran, sosialisasi SPT dan pengetahuan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap wajib pajak orang pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya pada KPP Tampan-Kota Pekanbaru.

Sebagai perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Marpaung sebelumnya terletak pada tempat penelitian dan variabelnya penelitian yang diperluas. Tempat penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Marpaung di KPP Tampan-Pekanbaru dengan menggunakan empat variabel penelitian yaitu, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Sosialisasi, dan Kualitas Pelayanan sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan di KPP Senapelan-Pekanbaru dan dengan menambah satu variabel penelitian menjadi lima variabel yaitu, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan wajib pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, dan Pengawasan pajak.

H. Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian



I. Hipotesis

1. Faktor kesadaran wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Faktor kesadaran wajib pajak sangat penting dalam melaksanakan sistem *self assesment* (Gunadi, 2000) dan (Pamungkas, 2003). Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan ingat kepada hal-hal yang benar (Kamus besar Bahasa Indonesia.2005.hal 975). Maka kesadaran terhadap *self assesment* adalah bila mereka telah mengetahui dan sangat sepakat atau setuju bahwa seharusnya:

- a. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
- b. Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPT Tahunannya ke KPP setempat.
- c. Wajib Pajak menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan petugas pajak.
- d. Wajib Pajak menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri.

Menurut Fidel (2004) ada dua kesulitan wajib pajak sehingga tidak mengisi sendiri SPT tahunannya dan melimpahkannya kepada pihak ketiga adalah belum mendapatkan buku petunjuk yang relevan dan wajib pajak tidak mau tahu tentang SPT. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditentukan hipotesis pertama dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

H_1 : Kesadaran wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

2. Faktor sosialisasi SPT mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat luas. Surat Pemberitahuan sebenarnya bukan barang baru lagi bagi masyarakat luas terkhusus bagi mereka yang memiliki NPWP yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Namun, seperti yang kita ketahui masih sangat banyak wajib pajak tidak tahu cara pengisian sendiri SPT Tahunannya. Maka daripada itu Direktorat Jenderal Pajak berusaha keras melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, adapun sosialisasi yang biasa dilakukan berupa pembagian buku petunjuk pengisian SPT Tahunan secara rutin kepada wajib pajak.

Namun, pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan kurang optimal, misalnya buku petunjuk yang dibagikan tidak secara rutin dan kadang kala sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang terjadi di lapangan (Hamdan, 2002). Pada akhirnya banyak wajib pajak menjadi tidak mengerti dan tidak mampu untuk mengisi sendiri SPT tahunannya, yang mengakibatkan mereka menggunakan jasa orang lain maupun konsultan pajak. Selain itu dilakukan dengan cara pemberitahuan atau pengiriman SPT Tahunan diberikan pada awal November, sehingga ada kurang lebih 4 bulan wajib pajak telah diberitahukan pengisiannya. Dimana dalam pengiriman SPT tersebut ada cara-cara pengisiannya dalam buku petunjuk baik itu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Disamping

sosialisasi pengiriman SPT tersebut, juga melalui media elektronik, yaitu melalui salah satu acara di televisi swasta (Fidel, 2004). Media elektronik ini biasanya hanya berupa mengingatkan wajib pajak agar tidak lupa menyetorkan pajak terutang mereka dan tidak berhubungan dengan bagaimana cara wajib pajak mengisi sendiri SPT tahunannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat tentukan suatu hipotesis ketiga penelitian ini yakni sebagai berikut.

H₂ : Sosialisasi SPT mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

3. Faktor pengetahuan wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki NPWP bisa dikatakan masih sangat banyak wajib pajak di Indonesia yang belum memahami dengan benar tata cara pengisian formulir SPT (Tambunan, 2003). Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan pihak ketiga, misalnya petugas pajak yang diminta mengisi SPT oleh Wajib Pajak (Hamdan, 2002).

Banyak pelanggaran sistem *self assesment* yang terjadi karena Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman perpajakan yang memadai terkhusus dalam pengisian sendiri SPT tahunan. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dimana masih sangat banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa pengawai pajak, orang lain yang memahami tentang pengisian SPT maupun Konsultan pajak tanpa mau belajar untuk mengisi sendiri SPT tahunannya sendiri.

Sebenarnya tinggi rendahnya pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT dapat dilihat dari apakah Wajib Pajak telah membaca buku

petunjuk pengisian SPT hal ini di ungkapkan oleh Parwati (2004). Dapat juga dilihat dari apakah Wajib Pajak kesulitan atau tidak dalam memahami buku petunjuk pengisian SPT dan apakah Wajib Pajak dapat mengisi sendiri formulir SPT dengan baik dan benar (Nurmantu,2003:16). Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan tersebut pengetahuan tentang tata cara pengisian SPT tahunan, kecenderungan wajib pajak masih memiliki minat yang rendah dalam memahami buku petunjuk yang diberikan kepada mereka. Sehingga wajib pajak tidak mampu untuk mengisi sendiri SPT tabunannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditentukan hipotesis kedua dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

H₃ : Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

4. Faktor kualitas layanan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk menempatkan hasil pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, efisien dan cepat. Seorang wajib pajak yang pada dasarnya juga berperan sebagai seorang pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ketika melakukan transaksi dengan pihak Dirjen Pajak sebagai penyedia layanan jasa. Dirjen Pajak adalah penyedia jasa yang bersifat monopoli karena tidak adanya pesaing yang bergerak pada bidang sejenis. Meskipun begitu ketidakpuasan seorang pelanggan dalam hal ini Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan akan berakibat pada citra Dirjen Pajak di mata konsumen tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggali layanan pihak Dirjen Pajak dengan berdasarkan pada kualitas layanan dalam manajemen pemasaran.

Pelayanan yang berkualitas adalah orientasi sumber daya manusia dalam suatu perusahaan terhadap kepuasan pelanggan.

a) Pengertian Kualitas layanan (*service quality*)

Dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat kualitas layanan pihak Dirjen Pajak peneliti menggunakan pengertian kualitas layanan dalam manajemen pemasaran yang definisi kualitas layanan ada beberapa macam, antara lain :

Menurut *Philip Kotler* (2006:410) adalah : “Kualitas layanan adalah ciri-ciri dan karakteristik produk secara keseluruhan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak langsung”.

Menurut *Philip B Cosby* dalam Fandy Tjiptono (1997:12) adalah: “Kualitas layanan adalah menaruh perhatian besar pada transformasi budaya kualitas. Ia mengemukakan pentingnya melibatkan setiap orang dalam organisasi, yaitu dengan jalan menekankan kesesuaian individual terhadap persyaratan/tuntutan. Pendekatan *Cosby* adalah *Top-down*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut *Zeithaml Valeria* dalam *Philip Kotler* dan *Kevi Lane Keller* (2006:412-414) terdiri dari lima faktor, antara lain:

1) Bukti langsung (*Tangible*)

Penampilan kualitas dan alat-alat yang digunakan secara fisik, penampilan karyawan dan peralatan komunikasi.

2) Keandalan (*Realibility*)

Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3) Daya Tanggap (*Responsibility*)

Keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan, memberikan pelayanan dengan sigap dan mampu mengatasi keluhan para pelanggan dengan cepat.

4) Jaminan (*Assurance*)

Tingkat pengetahuan dan tingkat kesopansantunan yang dimiliki karyawan, disamping kemampuan mereka memberikan kepercayaan kepada pelanggan, dimana dimensi *assurance* merupakan penggabungan dari beberapa dimensi, antara lain:

- a) Kemampuan (*Competence*), artinya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para staf dalam melakukan pelayanan.
- b) Kesopanan (*Courtesy*), artinya kesopanan yang meliputi keramahan, pelatihan dan sikap para karyawan.
- c) Kepercayaan (*Credibility*), artinya kredibilitas atas kepercayaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi dan sebagainya.

5) Empati (*Empathy*)

Adanya perhatian khusus yang diberikan kepada setiap pelanggan secara individual. Untuk sebuah organisasi perusahaan pelayanan, segala karakteristik kualitas pelayanan hendaknya secara relatif dapat diukur dan disesuaikan dengan persyaratan kualitas. Adapun empati merupakan penggabungan dari beberapa dimensi berikut:

- a) Kemudahan (*access*), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan pelayanan yang ditawarkan perusahaan.
- b) Komunikasi (*Communication*), artinya kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan.

Kualitas layanan akan mempengaruhi wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan dimana pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor pajak saat si wajib pajak akan menyetorkan pajak terutang. Pelayanan tersebut dapat berupa pegawai memberikan pengarahan jika wajib pajak salah dalam mengisi SPT tahunannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditentukan hipotesis keempat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

H₄ : Kualitas layanan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

5. Faktor pengawasan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*

Gagasan membentuk suatu komisi pengawas perpajakan untuk mengawasi penerimaan pajak menjadi ide cukup menarik. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau setiap wajib pajak (WP) diwajibkan menyampaikan laporan mengenai kewajiban perpajakannya ke kantor pajak. Sejak sistem *self assessment* diberlakukan

kenyataannya masih banyak wajib pajak tidak mengerti persoalan pajak. sekalipun proses penyuluhan atau sosialisasi mengenai perpajakan gencar dilakukan, tidak bisa dipastikan masyarakat bisa segera memahami. Dibutuhkan waktu untuk itu terlebih bagi kalangan awam yang tidak memahami ketentuan pajak.

Pengawasan terhadap pajak adalah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Adanya komisi-komisi pengawasan perpajakan menunjukan tidak berjalannya sistem pengawasan yang telah ada. Mtmgkin saja masyarakat menilai pengawasan yang telah dilakukan tampaknya kurang berjalan dengan baik, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengawasinya. Berdasarkan penjelesan diatas dapat dtentukan hipotesis ke lima dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

H₅ : Pengawasan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Senapelan-Pekanbaru pada bulan Maret 2010. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Hamzah Marpaung (2010). Perbedaan Penelitian Ini terletak Pada Objek dan Tempat Penelitiannya.

3.1 Populasi

Indriantoro dan Supomo (1999:115) mendefenisikan populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Senapelan-Kota Pekanbaru dan statusnya masih aktif

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2010. Adapun data jumlah wajib pajak perseorangan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan adalah 68.951 pada tahun 2010. Sedangkan Teknik sampling yang digunakan adalah quota sampling. Jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{ND^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

D : Tingkat Kesalahan

$$N = \frac{68.951}{(68.951 \times 0,1^2) + 1}$$

$$N = \frac{68.951}{690,51}$$

$$n = 99,85 \text{ orang}/100 \text{ orang}$$

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara pembagian kuesioner yang Wajib Pajak sebagai responden penelitian. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada KPP Senapelan-Kota Pekanbaru dan dalam prosesnya menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya (tidak diwakilkan).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karna penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya pada KPP Senapelan-Kota Pekanbaru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

- a. Data primer adalah data utama yang dipakai untuk menjawab masalah yaitu data mengenai perilaku SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Senapelan-Pekanbaru.
- b. Data sekunder adalah data yang menunjang penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari data mengenai profil Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Senapelan-Kota Pekanbaru.

3 4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

- a. Kuesioner. Merupakan cara memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi, tujuan pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden.
- b. Observasi. Meliputi penelitian dan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diperbandingkan dengan teori yang dikemukakan agar dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran.

Kategori-kategori meliputi kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi SPT, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan terakhir pengawasan perpajakan yang diukur dengan menggunakan rating yang dijumlahkan atau disebut dengan skala Sikap Likert agar didapatkan data penelitian menjadi skala interval. Metode ini adalah metode penskalaan sikap dengan menggunakan distribusi respon sebagai dasar penentuan skala. Untuk melakukan penskalaan, responden diberi sejumlah daftar pertanyaan yang harus dijawab dengan pernyataan kesetujuan dan ketidaksetujuan. Pilihan jawaban pertanyaan digolongkan menjadi lima kategori yakni: “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Ragu-Ragu” (R), “Tidak Setuju” (TS), dan “Sangat Tidak Setuju” (STS).

Adapun skala interval yang diberikan adalah bergerak dari “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Ragu-Ragu” (R), “Tidak Setuju” (TS), “Sangat Tidak Setuju” (STS). Cara penentuan ini berlaku untuk semua variabel, baik jenis motif maupun kepuasan. Pada item-item yang digunakan maka pilihan jawaban:

- a) Sangat Setuju (SS) mendapat Skor 5
- b) Setuju (S) mendapat skor 4
- c) Ragu - Ragu (R) mendapat skor 3
- d) Tidak Setuju (TS) mendapat skor 2
- e) Sangat Tidak Setuju (STS) mendapat skor 1

3.5 Identifikasi variabel

Ada beberapa variabel dalam penelitian ini, yaitu:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya berubah apabila adanya perubahan variabel lainnya. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah konsep Self Assessment.

b. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang nilainya selalu berubah-ubah tanpa adanya pengaruh dari variabel-variabel lainnya. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pengisian SPT dan kualitas layanan serta pengawasan perpajakan.

Variabel-variabel tersebut diatas selanjutnya dioperasikan sebagai berikut:

1. Variabel Dependen : *Self Assessment*

Menyatakan wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, mengisi dan membayar sendiri pajak yang terhutang.

2. Variabel Independen

a. Kesadaran Wajib Pajak

Menyatakan pendapat wajib pajak sebagai responden terhadap SPT Tahunan

b. Sosialisasi SPT

Menyatakan pendapat responden terhadap sosialisasi SPT Tahunan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini.

c. Pengetahuan wajib pajak tentang pengisian SPT

Menyatakan sejauh mana tingkat pengetahuaun responden dalam pengisian SPT tahunan.

d. Kualitas Layanan

Menyatakan pendapat responden terhadap layanan pemungutan pajak SPT Tahunan.

e. Pengawasan perpajakan tentang pengisian SPT

Menyatakan sejauh mana tingkat Pengawasan perpajakan responden dalam pengisian SPT tahunan.

3.6 Analisis Data

Masing-masing hipotesis akan diuji dengan alat analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yaitu alat analis yang digunakan apabila ingin menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Data diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistic Product Service Solution*) version 13.00 yaitu dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Y | = | <i>Self Assesment</i> |
| a | = | Konstanta |
| X ₁ | = | Kesadaran Wajib Pajak |
| X ₂ | = | Sosialisasi Pajak |
| X ₃ | = | Pengetahuan Wajib Pajak |
| X ₄ | = | Kualitas layanan |
| X ₅ | = | Pengawasan Pajak |
| $\beta (1,2,3,4,5)$ | = | Koefisien Regresi |
| ε | = | Error |

Dalam analisi regresi berganda ini selain mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Penelitian ini menggunakan alfa (tingkat kesalahan) 5% sehingga tingkat keyakinan / *confidence interval* (CI) 95%.

3.7 Pengukuran Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian, data yang diperoleh harus diuji terlebih dahulu sebelum memasuki proses analisis. Pengujian data yang dilakukan meliputi pengujian validitas (keabsahan) dan pengujian reliabilitas. pengujian validitas dilakukan untuk melakukan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur, sedangkan pengujian reabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen yang di pakai. Penelitian ini menggunakan 2 metode pengukuran instrumen yaitu ; pertama pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Sedangkan pengukuran instrumen kedua yaitu pengujian asumsi

klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengukuran instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

a. Metode Pengujian Kualitas Data

Ketetapan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Indriantoro Nur, 2002;180) untuk menghasilkan data yang berkualitas.

1) Uji Validitas

Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang kuat apabila instrumen tersebut mengukur apa yang sebenarnya diukur.

Uji validitas digunakan untuk mengetahui item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur pengubah yang didapatkan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui valid suatu variabel, dilakukan pengujian dengan menggunakan teknik *pearson correlation* dengan nilai korelasi diatas 0, 30 (Sekaran, 2000:169).

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan teknik *cronbach alpha*. Dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar: (a)

<0, 6 tidak reliabel, (b) 0, 6-0, 7 *acceptable*, (c) 0, 7-0, 8 baik, dan (d) >0, 8 sangat baik (Sekaran, 2000:171).

3) Uji Normalitas Data

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2001: 214).

Dasar pengambil keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, serta (2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendukung grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* dalam uji normalitas data digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, Kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0, 05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal (Ghozali, 2005:30) .

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari bias. Yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan

akhirnya hasil regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka digunakan asumsi klasik.

Tiga asumsi klasik yang di perhatikan adalah :

1. Uji Multikolinearitas

Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinearitas dalam penelitian ini adalah menggunakan *Variance Inflation Factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari *Tolerance* sehingga formulasi formulanya sebagai berikut :

$$\mathbf{VIF} = \frac{1}{(1 - R^2)}$$

Dimana R^2 merupakan koefisien determinan. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan VIF akan besar. Untuk nilai bila $VIF > 5$ maka dianggap ada Multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya $VIF < 5$ maka dianggap tidak terdapat Multikolinearitas (Ghozali, 2005).

2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t jika ada, berarti autokorelasi. Dalam penelitian keberadaan autokorelasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_1 - e_{t-1})}{\sum_{t=2}^{t=n} e_1^2}$$

Keterangan :

1. Jika angka *Durbin Watson* (DW) dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika angka *Durbin Watson* (DW) diantara -2 sampai +2 berarti terdapat tidak ada Autokorelasi.
3. Jika angka *Durbin Watson* (DW) diatas =2 berarti terdapat Autokorelasi Negatif.

Untuk menentukan batas tidak terjadinya Autokorelasi dalam model regresi tersebut adalah $du < d < 4$ dimana du adalah batas atas dari nilai d *Durbin Watson* yang terdapat pada tabel uji *Durbin Watson*. Sedangkan d merupakan nilai d *Durbin Watson* dari hasil perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak *Durbin Watson* dari hasil perhitungan yang dilakukan. Model regresi tidak mengandung masalah Autokorelasi jika kriteria $du < d < 4$ - du terpenuhi.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi Heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar).

Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan Heterokesatisitas jika scatterplot membentuk pola tertentu maka regresi mengalami gangguan

Heterokedastisitas. Sebaliknya jika scatterplot tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan Heterokedastisitas.

3.8 Pengujian Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial (Uji t) dan secara menyeluruh atau simultan (Uji F) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai sesuatu sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95 % dengan tingkat signifikan sebesar 0, 5 % dan *degree of freedom* (df) $n - k$ membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Untuk pengujian-pengujian variabel independen secara bersamaan digunakan statistik Uji F (F-test) dilakukan untuk melakukan apakah model pengujian hipotesis yang dilakukan tepat.

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat kepercayaan alpha yang ditentukan adalah 5% membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yaitu apabila $F_{hitung} >$

F_{tabel} atau $p \text{ value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti bahwa variabel independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau $P_{\text{value}} > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasilnya tidak signifikan yang berarti bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel–variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengistemasi nilai variabel dependen.

Begitu juga untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dilihat dari koefisien korelasi parsial. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling besar adalah independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Teknik pengumpulan data telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada KPP Senapelan-Kota Pekanbaru yang berjumlah 100 responden. Tingkat pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.1 dibawah ini :

Tabel V.1 Tingkat Pengumpulan Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|--|---------------|-------------------|
| Total Kuesioner yang disebar | 100 | 100% |
| Total Kuesioner yang tidak terkumpul kembali | 9 | 9% |
| Total Kuesioner yang terkumpul kembali | 91 | 91% |
| Total kuesioner yang tidak dapat diolah | 2 | 2% |
| Total kuesioner yang dapat diolah | 89 | 89% |

Sumber : Data Primer yang diolah (2010)

Berdasarkan dari tabel IV.1 dapat dijelaskan bahwa peneliti menyebarkan 100 kuesioner, kuesioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 9 buah. Kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 91 buah. Kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 2 buah. Jadi total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar adalah 89 buah. Sedangkan data demografi responden berdasarkan jabatan, pendidikan terakhir dan masa kerja responden terlihat pada tabel IV.2 dibawah ini :

Tabel IV.2 Data Demografi Responden

| Keterangan | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 65 | 73.03 |
| Perempuan | 24 | 26.97 |
| Usia | | |
| < 30 tahun | 5 | 5.62 |
| 31 s/d 40 tahun | 33 | 37.08 |
| 41 s/d 50 tahun | 25 | 28.09 |
| > 50 tahun | 26 | 29.21 |
| Status | | |
| Menikah | 71 | 79.78 |
| Belum Menikah | 18 | 20.22 |
| Pekerjaan | | |
| Pegawai Swasta | 7 | 7.87 |
| Pegawai Negeri | 17 | 19.10 |
| Wiraswasta | 65 | 73.03 |
| Pengeluaran Perbulan | | |
| Rp. 2.000.001 - Rp. 5.000.000 | 18 | 20.22 |
| Rp. 5.000.001 - Rp. 8.000.000 | 64 | 71.91 |
| > Rp. 8.000.001 | 7 | 7.87 |
| Pendidikan | | |
| SMA Sederajat | 19 | 21.35 |
| Diploma (DI/DII/DIII) | 27 | 30.34 |
| Sarjana (S1/S2) | 43 | 48.31 |

Sumber : Data Primer yang diolah (2010)

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa persentase data demografi responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden laki-laki yaitu 73,03% dan perempuan 26,97%. Sedangkan usia responden di dominasi oleh responden berusia antara 31 sampai dengan 40 tahun dengan persentase 37,08%, sedangkan responden berusia dibawah 30 tahun dengan sebanyak 5 orang dengan persentase 5,62%. Status responden di dominasi oleh responden yang sudah menikah yaitu sebanyak 71 orang dengan persentase 79,78%, dan yang belum menikah sebanyak 18 orang dengan persentase 20,22%. Pekerjaan responden di dominasi oleh

responden yang wiraswasta yaitu sebanyak 65 orang dengan persentase 73,03%, dan yang pegawai swasta sebanyak 7 orang dengan persentase 7,87%. Pengeluaran perbulan responden di dominasi oleh responden yang mempunyai pengeluaran antara Rp. 5.000.001 sampai Rp. 8.000.000 yaitu sebanyak 64 orang dengan persentase 71,91%, dan yang mempunyai pengeluaran diatas Rp. 8.000.001 sebanyak 7 orang dengan persentase 7,87%. Pendidikan terakhir responden di dominasi oleh responden yang berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 43 orang dengan persentase 48,31%, dan yang berpendidikan SMA sederajat sebanyak 19 orang dengan persentase 21,35%.

Analisa data dilakukan terhadap 89 responden yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel IV.3 dibawah ini :

Tabel IV.3 Statistik Deskriptif Variabel

| Descriptive Statistics | | | | |
|------------------------|----|---------|---------|-------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean |
| Kesadaran | 89 | 13 | 29 | 23.99 |
| Sosialisasi | 89 | 13 | 30 | 23.47 |
| Pengetahuan | 89 | 20 | 39 | 31.74 |
| Kualitas | 89 | 55 | 89 | 75.83 |
| Pengawasan | 89 | 6 | 15 | 11.99 |
| Self_Assesment | 89 | 8 | 20 | 15.40 |
| Valid N (listwise) | 89 | | | |

Sumber : Lampiran 1 Statistik Deskriptif

Dalam tabel IV.3 terlihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 29, dan nilai rata-rata sebesar 23,99. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 23,99, maka responden tersebut memiliki kesadaran lebih tinggi tentang pembayaran pajak.

Variabel sosialisasi pajak mempunyai nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 23,47. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 23,47, maka responden menyatakan sosialisasi pajak yang dilakukan Dirjen pajak lebih baik.

Variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 39, dan nilai rata-rata sebesar 31,74. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 31,74, maka responden tersebut memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang pajak.

Variabel kualitas layanan pajak mempunyai nilai minimum sebesar 55, nilai maksimum sebesar 89, dan nilai rata-rata sebesar 75,83. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 75,83, maka responden tersebut menyatakan kualitas layanan yang diberikan Dirjen pajak lebih baik.

Variabel pengawasan mempunyai nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 15, dan nilai rata-rata sebesar 11,99. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 11,99, maka responden tersebut menyatakan pengawasan yang dilakukan Dirjen pajak lebih baik.

Variabel *Self Assesment* mempunyai nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata sebesar 15,40. Jika jawaban rata-rata responden lebih tinggi dari 15,40, maka responden tersebut menyatakan *Self Assesment* yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak lebih baik.

4.2. Analisa Data

4.2.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum data yang terkumpul dianalisis perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini akan menentukan layakannya data untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yang dilakukan terhadap seluruh item yang digunakan, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel. Oleh karena itu kuisionernya layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian ini. Untuk selanjutnya peneliti membuat rekapitulasi hasil uji validitas dan reliabilitas seperti dalam Tabel IV.4 dibawah ini.

Tabel IV.4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

| NO | Korelasi | Keputusan | Koefisien Alpha | Keputusan |
|-----------|----------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| X1 | | | 0.691 | Reliabel, <i>acceptable</i> |
| X1.1 | 0.701 | Valid | | |
| X1.2 | 0.793 | Valid | | |
| X1.3 | 0.732 | Valid | | |
| X1.4 | 0.485 | Valid | | |
| X1.5 | 0.691 | Valid | | |
| X1.6 | 0.346 | Valid | | |
| | | | | |
| X2 | | | 0.622 | Reliabel, <i>acceptable</i> |
| X2.1 | 0.391 | Valid | | |
| X2.2 | 0.499 | Valid | | |
| X2.3 | 0.711 | Valid | | |
| X2.4 | 0.730 | Valid | | |
| X2.5 | 0.633 | Valid | | |
| X2.6 | 0.553 | Valid | | |
| | | | | |
| X3 | | | 0.772 | Reliabel, Baik |
| X3.1 | 0.674 | Valid | | |
| X3.2 | 0.736 | Valid | | |
| X3.3 | 0.606 | Valid | | |

| | | | | |
|-----------|-------|-------------|--------------|------------------------------------|
| X3.4 | 0.546 | Valid | | |
| X3.5 | 0.576 | Valid | | |
| X3.6 | 0.653 | Valid | | |
| X3.7 | 0.674 | Valid | | |
| X3.8 | 0.498 | Valid | | |
| | | | | |
| X4 | | | 0.732 | Reliabel, baik |
| X4.1 | 0.558 | Valid | | |
| X4.2 | 0.577 | Valid | | |
| X4.3 | 0.435 | Valid | | |
| X4.4 | 0.187 | Tidak Valid | | |
| X4.5 | 0.433 | Valid | | |
| X4.6 | 0.160 | Tidak Valid | | |
| X4.7 | 0.528 | Valid | | |
| X4.8 | 0.332 | Valid | | |
| X4.9 | 0.390 | Valid | | |
| X4.10 | 0.440 | Valid | | |
| X4.11 | 0.259 | Tidak Valid | | |
| X4.12 | 0.390 | Valid | | |
| X4.13 | 0.558 | Valid | | |
| X4.14 | 0.634 | Valid | | |
| X4.15 | 0.529 | Valid | | |
| X4.16 | 0.608 | Valid | | |
| X4.17 | 0.468 | Valid | | |
| X4.18 | 0.230 | Tidak Valid | | |
| X4.19 | 0.139 | Tidak Valid | | |
| | | | | |
| X5 | | | 0.643 | Reliabel, <i>acceptable</i> |
| X5.1 | 0.831 | Valid | | |
| X5.2 | 0.833 | Valid | | |
| X5.3 | 0.616 | Valid | | |
| | | | | |
| Y | | | 0.678 | Reliabel, <i>acceptable</i> |
| Y1 | 0.724 | Valid | | |
| Y2 | 0.780 | Valid | | |
| Y3 | 0.718 | Valid | | |
| Y4 | 0.623 | Valid | | |

Sumber : Lampiran 2-7

Dari tabel IV.4 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini diukur dengan 52 item pertanyaan dan 6 variabel yang terdiri dari :

1. Kesadaran wajib pajak diukur dengan 6 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,346, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,691 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.
2. Sosialisasi pajak diukur dengan 6 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,391, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,622 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.
3. Pengetahuan wajib pajak diukur dengan 8 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,498, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,772 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.
4. Kualitas layanan diukur dengan 19 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi terdapat 5 item variabel di bawah 0,30 dan tidak memenuhi syarat untuk valid sehingga item-item tersebut harus

dihapuskan dan dilakukan uji validitas tahap kedua terhadap 14 item variabel yang valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,732 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan baik, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

5. Pengawasan pajak diukur dengan 3 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,616, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,643 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.
6. *Self assesment* diukur dengan 4 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,623, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,678 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas diatas terdapat 5 item variabel pada variabel kualitas layanan yang tidak memenuhi syarat untuk valid. Oleh karena itu maka dilakukanlah uji validitas dan reliabilitas tahap kedua untuk variabel kualitas layanan seperti terdapat pada tabel IV.5 dibawah :

Tabel IV.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap Kedua Kualitas Layanan

| NO | Korelasi | Keputusan | Koefisien Alpha | Keputusan |
|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|
| X4 | | | 0.772 | Reliabel, baik |
| X4.1 | 0.574 | Valid | | |
| X4.2 | 0.589 | Valid | | |
| X4.3 | 0.414 | Valid | | |
| X4.5 | 0.427 | Valid | | |
| X4.7 | 0.556 | Valid | | |
| X4.8 | 0.334 | Valid | | |
| X4.9 | 0.363 | Valid | | |
| X4.10 | 0.448 | Valid | | |
| X4.12 | 0.432 | Valid | | |
| X4.13 | 0.585 | Valid | | |
| X4.14 | 0.649 | Valid | | |
| X4.15 | 0.554 | Valid | | |
| X4.16 | 0.623 | Valid | | |
| X4.17 | 0.473 | Valid | | |

Sumber : Lampiran 8

Uji validitas dan reliabilitas tahap kedua variabel kualitas layanan diukur dengan 14 item pertanyaan. Hasil uji validitas menunjukkan nilai korelasi yang terendah yaitu 0,334, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid. Setelah dilakukan uji reliabilitasnya, nilai koefisien alpha adalah 0,772 yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.

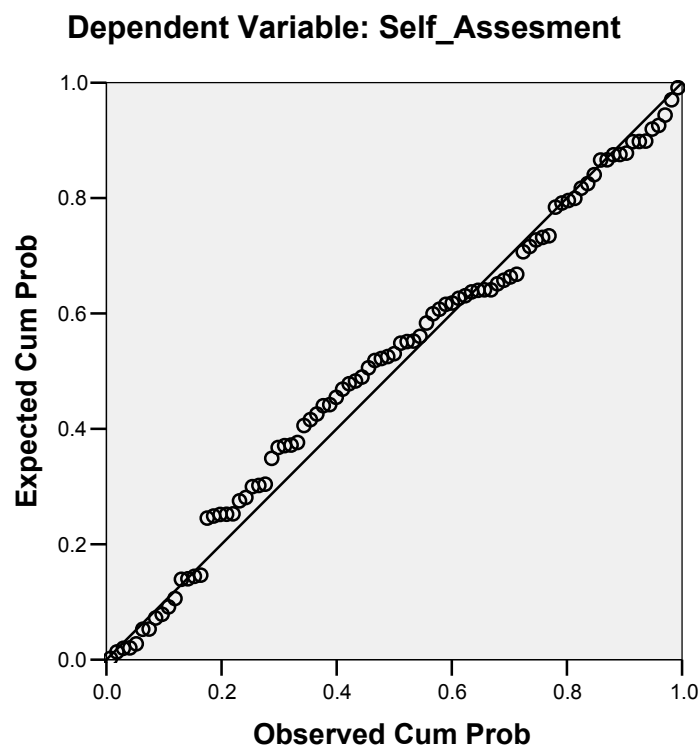
4.2.2. Analisis Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1

Diagram P-P Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Lampiran 9

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat Normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal.

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, Kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal

(Ghozali, 2005:30) . Hasil uji Normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.6 dibawah.

Tabel IV.6 Hasil Uji Normalitas Variabel penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | Kesadaran | Sosialisasi | Pengetahuan | Kualitas | Pengawasan | Self_ Assesment |
|--------------------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-----------------|
| N | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Normal Parameters | | | | | | |
| Mean | 23.99 | 23.47 | 31.74 | 55.57 | 11.99 | 15.40 |
| Std. Deviation | 3.203 | 3.230 | 4.604 | 6.390 | 1.963 | 2.632 |
| Most Extreme Differences | | | | | | |
| Absolute | .131 | .115 | .140 | .139 | .139 | .151 |
| Positive | .061 | .082 | .093 | .068 | .104 | .085 |
| Negative | -.131 | -.115 | -.140 | -.139 | -.139 | -.151 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 1.232 | 1.090 | 1.324 | 1.310 | 1.308 | 1.427 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .096 | .186 | .060 | .064 | .065 | .034 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 9

Tabel IV.6 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel kesadaran wajib pajak, adalah sebesar 1,232 dengan signifikansi sebesar 0,096. Nilai K-S-Z untuk variabel sosialisasi pajak, adalah sebesar 1,090 dengan signifikansi sebesar 0,186. Nilai K-S-Z untuk variabel pengetahuan wajib pajak, adalah sebesar 1,324 dengan signifikansi sebesar 0,060. Nilai K-S-Z untuk variabel kualitas layanan, adalah sebesar 1,310 dengan signifikansi sebesar 0,064. Nilai K-S-Z untuk variabel pengawasan, adalah sebesar 1,308 dengan signifikansi sebesar 0,065. Nilai K-S-Z untuk variabel *self assesment*, adalah sebesar 1,427 dengan signifikansi sebesar 0,034. Nilai K-S-Z semua variabel tersebut diatas 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

4.2.3. Analisis Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dengan menggunakan VIF paling jamak dilakukan dalam penelitian di Indonesia. Asumsi Multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10. Karena $VIF = 1/Tolerance$, maka asumsi bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika Tolerance diatas 0,5 (jonikriswanto.blogspot.com). Data yang baik dapat dikatakan bebas multikonearitas. Hasil Uji Multikolinearitas disimpulkan seperti pada tabel IV.7.

Tabel IV.7 Hasil Uji Multikolinearitas

| Coefficients | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|--|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF | |
| 1 (Constant) | 8.303 | 2.907 | | 2.856 | .005 | | | |
| Kesadaran | .035 | .102 | .043 | .346 | .730 | .706 | 1.416 | |
| Sosialisasi | -.045 | .097 | -.056 | -.469 | .641 | .769 | 1.301 | |
| Pengetahuan | .116 | .078 | .203 | 1.484 | .142 | .579 | 1.728 | |
| Kualitas | .023 | .057 | .055 | .398 | .692 | .569 | 1.757 | |
| Pengawasan | .199 | .154 | .149 | 1.296 | .199 | .822 | 1.216 | |

a. Dependent Variable: Self_Assesment

Sumber : Lampiran 10

Pada tabel IV.7 menunjukkan nilai Tolerance untuk variabel kesadaran wajib pajak, adalah sebesar 0,706 dengan VIF sebesar 1,416. Nilai Tolerance untuk variabel sosialisasi pajak, adalah sebesar 0,769 dengan VIF sebesar 1,301. Nilai Tolernace untuk variabel pengetahuan wajib pajak, adalah sebesar 0,579 dengan VIF sebesar 1,728. Nilai K-S-Z untuk variabel kualitas layanan, adalah sebesar 0,569 dengan signifikansi sebesar 1,757. Nilai K-S-Z untuk variabel pengawasan, adalah sebesar 0,822 dengan signifikansi sebesar 1,216. Berarti tidak

terdapat gangguan multikolinearitas pada penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dan layak digunakan.

b) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif

Tabel IV.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^a

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .321 ^a | .103 | .049 | 2.566 | 1.966 |

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Kesadaran, Sosialisasi, Pengetahuan, Kualitas

b. Dependent Variable: Self_Assessment

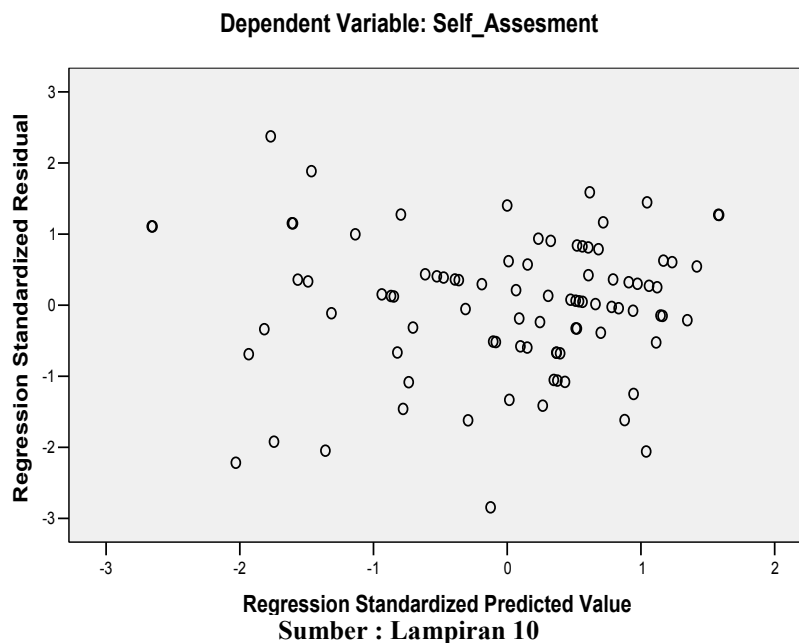
Sumber : Lampiran 10

Pada tabel IV.8 terlihat bahwa angka Durbin Watson dibawah 2 yaitu sebesar 1,966 yang berarti tidak ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

c) Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Santoso, 2001: 210). Seperti terlihat pada gambar IV.2 dibawah.

Gambar IV.2
Diagram Scatterplot Heterokedastisitas
Scatterplot



Pada Gambar IV.2 tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

C. Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi linear, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan *self assesment* sebagai variabel dependen dan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan pengawasan sebagai variabel independen. Hasil hipotesis seperti yang tercantum dalam tabel IV.9 di bawah.

Tabel IV.9 Hasil Regresi

| | | Coefficients ^a | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 8.303 | 2.907 | | 2.856 | .005 | | |
| | Kesadaran | .035 | .102 | .043 | .346 | .730 | .706 | 1.416 |
| | Sosialisasi | -.045 | .097 | -.056 | -.469 | .641 | .769 | 1.301 |
| | Pengetahuan | .116 | .078 | .203 | 1.484 | .142 | .579 | 1.728 |
| | Kualitas | .023 | .057 | .055 | .398 | .692 | .569 | 1.757 |
| | Pengawasan | .199 | .154 | .149 | 1.296 | .199 | .822 | 1.216 |

a. Dependent Variable: Self_Assessment

Sumber : Lampiran 11

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

$$Y = 8,303 + 0,035X_1 - 0,045X_2 + 0,116X_3 + 0,023X_4 + 0,199X_5 + e$$

1. Konstanta sebesar 8,303 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 8,303.
2. Hasil regresi X1 menunjukkan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,035 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (*self assessment*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 3,5%.
3. Hasil regresi X2 menunjukkan variabel sosialisasi pajak sebesar -0,045 yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mengalami penurunan sebesar 1, maka variabel dependen (*self assessment*) juga akan mengalami penurunan sebesar 4,5%.

4. Hasil regresi X3 menunjukkan variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,116 yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (*self assesment*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 11,6%.
5. Hasil regresi X4 menunjukkan variabel kualitas layanan sebesar 0,023 yang menyatakan bahwa kualitas layanan mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (*self assesment*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 2,3%.
6. Hasil regresi X5 menunjukkan variabel pengawasan sebesar 0,199 yang menyatakan bahwa pengawasan mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel dependen (*self assesment*) juga akan mengalami peningkatan sebesar 19,9%.

4.3. Hasil Uji T

H₁: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar 0,346 dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,730 > 0,05$ maka H₁ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan ingat kepada hal-hal yang benar (Kamus besar Bahasa Indonesia.2005.hal 975). Menurut Fidel (2004) ada dua kesulitan wajib pajak sehingga tidak mengisi sendiri SPT tahunannya dan melimpahkannya kepada pihak ketiga adalah belum mendapatkan

buku petunjuk yang relevan dan wajib pajak tidak mau tahu tentang SPT. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa wajib pajak menyatakan tidak mau tahu tentang SPT.

Hal ini bisa dilihat dari butir pertanyaan point kesadaran No.4 dalam mengisi Formulir SPT tahunan, Wajib Pajak diperbolehkan menggunakan pihak ketiga. Dari butir pertanyaan diatas jelas terlihat bahwa masih banyak dijumpai dilapangan wajib pajak menggunakan pihak ketiga dalam pengisian Formulir SPT tahunan. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*. Disamping responden tidak memahami pernyataan dan responden asal menjawab.

H₂: Sosialisasi SPT mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $-0,469$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,641 > 0,05$ maka H₂ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi SPT tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat luas. Surat Pemberitahuan sebenarnya bukan barang baru lagi bagi masyarakat luas terkhusus bagi mereka yang memiliki NPWP yang ditetapkan sebagai wajib pajak. Namun, seperti yang kita ketahui masih sangat banyak wajib pajak tidak tahu cara pengisian sendiri SPT Tahunannya. Dengan demikian diatas dapat diputuskan bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan dalam pengisian SPT tahunan.

Hal ini bisa dilihat dari butir pertanyaan point sosialisasi No.1 dan 2 bahwa Anda selalu mendapatkan buku petunjuk pengisian SPT secara rutin dan buku petunjuk pengisian SPT yang diberikan selalu adalah yang terbaru dan masih relevan (dapat digunakan). Namun, pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan kurang optimal, misalnya buku petunjuk yang dibagikan tidak secara rutin dan kadang kala sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang terjadi dilapangan (Hamdan, 2002). Pada akhirnya banyak wajib pajak menjadi tidak mengerti dan tidak mampu untuk mengisi sendiri SPT tahunannya, yang mengakibatkan mereka menggunakan jasa orang lain maupun konsultan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi SPT tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*. Disamping responden tidak memahami pernyataan dan responden asal menjawab.

H₃: Pengetahuan wajib pajak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar 1,484 dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,142 > 0,05$ maka H₃ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Sebenarnya tinggi rendahnya pemahaman atau pengetahuan Wajib Pajak dalam pengisian SPT dapat dilihat dari apakah Wajib Pajak telah membaca buku petunjuk pengisian SPT hal ini di ungkapkan oleh Parwati (2004). Dapat juga dilihat dari apakah Wajib Pajak kesulitan atau tidak dalam memahami buku petunjuk pengisian SPT dan apakah Wajib Pajak dapat mengisi sendiri formulir

SPT dengan baik dan benar (Nurmantu, 2003:16). Jadi berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan tersebut pengetahuan tentang tata cara pengisian SPT tahunan, kecenderungan wajib pajak masih memiliki minat yang rendah dalam memahami buku petunjuk yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian maka diharapkan kepada setiap wajib pajak agar memiliki pengetahuan dalam pengisian SPT tahunannya sendiri.

Hal ini bisa dilihat dari butir pertanyaan point pengetahuan No.4 Anda sudah berkali-kali membaca buku petunjuk pengisian SPT tahunan, tetapi belum dapat mengisi sendiri SPT tahunan. Dari pertanyaan diatas ini jelas terlihat wajib pajak kesulitan dalam memahami buku petunjuk pengisian SPT dan tidak dapat mengisi sendiri formulir SPT dengan baik dan benar. Itu dikarenakan wajib pajak tidak memiliki pemahaman perpajakan yang memadai terkhusus dalam pengisian sendiri SPT tahunan. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*. Disamping responden tidak memahami pernyataan dan responden asal menjawab.

H₄: Kualitas layanan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar 0,398 dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,692 > 0,05$ maka H₄ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Salah satu cara untuk menempatkan hasil

pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, efisien dan cepat. Seorang wajib pajak yang pada dasarnya juga berperan sebagai seorang pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik ketika melakukan transaksi dengan pihak Dirjen Pajak sebagai penyedia layanan jasa. Diharapkan kepada Dirjen pajak agar meningkatkan kualitas layanan dalam melayani wajib pajak agar citra Dirjen Pajak di mata konsumen bisa terjaga dengan baik.

Hal ini bisa dilihat dari butir pertanyaan point pengetahuan No.7 petugas pajak tidak akan menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Namun kenyataan dilapangan dapat kita lihat masih sangat banyak wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa pengawai pajak yang diminta mengisikan SPT oleh Wajib Pajak (Hamdan, 2002). Ini berarti petugas pajak masih menggunakan kewenangannya demi keuntungan pribadi. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*. Disamping responden tidak memahami pernyataan dan responden asal menjawab.

H₅: Pengawasan mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar 1,296 dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,199 > 0,05$ maka H₅ ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

Pengawasan terhadap pajak adalah penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja. Gagasan membentuk suatu komisi pengawas perpajakan untuk mengawasi penerimaan pajak menjadi ide cukup menarik. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau setiap wajib pajak (WP) diwajibkan menyampaikan laporan mengenai kewajiban perpajakannya ke kantor pajak.

Hal ini bisa dilihat dari butir pertanyaan point pengetahuan No.3 petugas perpajakan selalu mengontrol dan mengawasi kebutuhan wajib pajak.. Tetapi masyarakat menilai pengawasan yang telah dilakukan tampaknya kurang berjalan dengan baik, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengawasinya. Adanya komisi-komisi pengawasan perpajakan menunjukkan tidak berjalannya sistem pengawasan yang telah ada. Dibutuhkan suatu pengawasan khusus dalam mengawasi setiap wajib pajak dalam pengisian SPT tahunannya. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*. Disamping responden tidak memahami pernyataan dan responden asal menjawab.

4.4. Hasil Uji F

Hasil uji regresi secara simultan atau uji F dapat dilihat pada tabel IV.10 dibawah ini :

Tabel IV.10 Hasil Uji F Hitung

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 62.985 | 5 | 12.597 | 1.913 | .101 ^a |
| | Residual | 546.453 | 83 | 6.584 | | |
| | Total | 609.438 | 88 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Kesadaran, Sosialisasi, Pengetahuan, Kualitas

b. Dependent Variable: Self_Assessment

Sumber : Lampiran 11

Pada tabel IV.10 hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,913 < F tabel sebesar 3,948, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,101 berada diatas 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan pengawasan secara signifikan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

4.5. Koefisien Determinasi

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel IV.11 dibawah :

Tabel IV.11 Hasil Koefisien Determinasi

| Model Summary ^a | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .321 ^a | .103 | .049 | 2.566 | 1.966 |

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Kesadaran, Sosialisasi, Pengetahuan, Kualitas

b. Dependent Variable: Self_Assessment

Sumber : Lampiran 11

Tabel diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,321, berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen tidak cukup kuat karena R dibawah dari 0,5. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,103 artinya 10,3% wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment* dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar 89,7% dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak menjalankan konsep *self assessment* pada KPP-Senapelan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian validitas untuk seluruh butir pertanyaan penelitian telah menunjukkan bahwa seluruh item yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah valid, artinya semua item variabel di atas 0,30 dan memenuhi syarat untuk valid.
2. Hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh butir pertanyaan penelitian telah memberikan hasil yang baik dan patut dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya yang berarti variabel tersebut reliabel dengan keputusan *acceptable*, karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60.
3. Hasil penelitian pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan bebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.
4. Normalitas rata-rata jawaban responden yang menjadi data dalam penelitian ini dilihat dari normal *probability plot* menunjukkan bahwa

distribusi jawaban responden adalah normal, sehingga persyaratan normalitas data terpenuhi.

5. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $0,346$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,730 > 0,05$ maka H_1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
6. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa sosialisasi SPT secara statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $-0,469$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,641 > 0,05$ maka H_2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi SPT tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
7. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $1,484$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,142 > 0,05$ maka H_3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
8. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak secara statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $0,398$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,692 > 0,05$ maka H_4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.

9. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa pengawasan statistik t tabel sebesar $1,662 > t$ hitung sebesar $1,296$ dengan signifikansi probabilitas sebesar $0,199 > 0,05$ maka H_5 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
10. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar $1,913 < F$ tabel sebesar $3,948$, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,101$ berada diatas $0,05$. Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan pengawasan secara signifikan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment*.
11. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar $0,103$ artinya $10,3\%$ wajib pajak untuk tidak menjalankan konsep *self assessment* dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas layanan dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar $89,7\%$ dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran :

1. Dengan ditolaknya semua hipotesis secara parsial, maka diharapkan kepada Dirjen pajak agar meningkatkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi tidak menjalankan konsep *self assessment*.

2. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Fidel, 2004. *Sosialisasi perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Gozali, 2005. *Statistik Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hamdan, Ainie. 2002. Tidak relevannya buku petunjuk pengisian dan sering berubahnya format SPT, memusingkan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1 (8), 36-40.
- Hamzah Marpaung, 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak mengisi sendiri SPT tahunannya di KPP-Tampan Pekanbaru. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2006. *Marketing Management*. Edition 2. New Jersey: Upper Saddle River.
- Mardiasmo, 2008, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meliani.S, 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Pajak*, Tabora Media : Yogyakarta.
- Muhammad Razikun, 2010. *Panduan Pajak Penghasilan*, PT. Multi Utama : Jakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, Usman, Hardius, 2006, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: FEUI.
- Nurmanto, Safri. 2004. *Pengantar Perpajakan* (Edisi 2). Jakarta: Granit.
- Pamungkas, Hanggoro. 2004. *Perhitungan Pajak, Catatan Kecil*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2 (8), 16-21.
- Parwati, Endang. 2004. *Kalau Mereka Mau Membaca Saya Pasti Bisa*. *Jurnal perpajakan Indonesia*, 3 (8), 44-45.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Riduwan, 2005, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Rika. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat tidak mengisi sendiri SPT tahunannya*. Skripsi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Tulis, Meliala, 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Edisi Enam, Semesta Media : Jakarta.

Thomas, 2010. *Perpajakan Indonesia*, Permata Puri : Jakarta.

Yulia, Hanna. 2008. *Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan perpajakan, keadilan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Tampan-Pekanbaru*. Skripsi Akuntansi Universitas Riau.